

SOSIALISASI MITIGASI BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN PANGANDARAN

Nur Ridwan Sajali¹, H. Aan Anwar Sihabudin², Irfan Nursetiawan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: ridwan.nr72@gamil.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan sosialisasi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pangandaran. Hal ini disebabkan kurang tanggapnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta instansi terkait dalam penanggulangan prabencana, belum optimal dalam melakukan komunikasi secara langsung pada lembaga kemasyarakatan ataupun lembaga pendidikan untuk menyampaikan informasi mengenai mitigasi bencana masih banyaknya fakta di lapangan yaitu kurang tanggapnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran beserta instansi terkait dalam penanggulangan Pra bencana. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sosialisasi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pangandaran. Desain penelitian ini menggunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 10 orang. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sosialisasi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pangandaran secara umum dilaksanakan dengan kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar informan menyatakan telah dilaksanakan namun belum optimal. Hambatan yang dihadapi berupa yaitu keterbatasan sumber anggaran, fasilitas pendukung yang belum memadai, lokasi desa yang memang cukup jauh dari kantor BPBD, belum adanya kesiapan dan kesediaan petugas untuk dapat mengunjungi setiap desa, belum adanya komunikasi dan kerjasama yang terjalin dengan organisasi kemasyarakatan. Upaya yang dilakukan yaitu mengajukan permohonan penambahan sejumlah anggaran pada pemerintah daerah untuk kegiatan operasional petugas di lapangan dan melengkapi sejumlah fasilitas pendukung. Selain itu terlihat adanya penyusunan ulang agenda kegiatan dan melakukan pendekatan melalui jalinan komunikasi dan koordinasi untuk menciptakan kerjasama.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Mitigasi, Bencana.*

PENDAHULUAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan resiko bencana di wilayahnya, memberikan pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan, darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Upaya yang dilakukan oleh BPBD dimulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat, dan yang terakhir tahap pemulihan atau tahap pasca bencana. Tahap pra bencana sendiri terdiri atas tiga kegiatan, salah satunya adalah mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana atau jika memungkinkan dengan meniadakan bahaya.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran bahwa Kabupaten Pangandaran memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, dan sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai. Kondisi Kabupaten Pangandaran termasuk

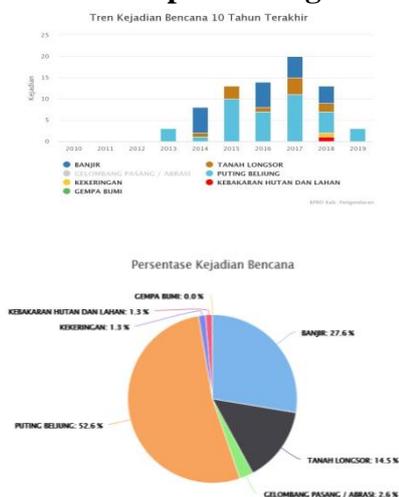
daerah rawan bencana dengan kategori yang sangat tinggi yaitu menduduki peringkat ke 16 di Tingkat Nasional (dari ±521 Kabupaten/Kota) dan menduduki peringkat ke 5 di Jawa Barat (dari 27 Kabupaten/Kota), data ini diambil dari data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013 dengan skor 215,20. Dalam RPJMN 2015-2019 diamanatkan bahwa masing-masing Kabupaten/Kota harus menurunkan Indeks Risiko Bencana, sebesar kurang lebih 30% artinya Kabupaten Pangandaran pada akhir tahun 2019 Indeks Risiko Bencananya harus turun dan skornya menjadi kurang lebih 150,64. (BPBD Kabupaten Pangandaran, 2020).

Penanggulangan Bencana yang melanda Kabupaten Pangandaran akhir-akhir ini dalam tahap pra bencana seperti kegiatan Pencegahan masih banyaknya fakta di lapangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran beserta instansi kurang tanggap terkait dalam penanggulangan Pra bencana seperti bencana banjir di Kecamatan Pangandaran akibat luapan sungai di Desa Babakan dan Pananjung dengan ketinggian sekitar 60 sentimeter dan paling tinggi mencapai 120 sentimeter dan bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Jayasari dan Jadikarya Kecamatan Langkaplancar, dan Desa Campaka Kecamatan Cigugur. (<https://news.detik.com/berita-jawa-barat>. diakses 6 Januari 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pangandaran Actual Disaster

Information (PADI), yang berada di bawah kendali Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran, data bencana yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat disajikan dalam grafik 1 sebagai berikut:

Grafik .1
Tren Kejadian Bencana 10 Tahun Terakhir Kabupaten Pangandaran



Sumber : BPBD Kabupaten Pangandaran, 2021

Berdasarkan grafik 1 di atas diketahui bahwa di Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu 10 tahun bencana yang paling sering terjadi yaitu pada tahun 2017, tercatat bencana puting beliung sebanyak 11 kali yaitu di Kecamatan Parigi, Kecamatan Cigugur dan Kecamatan Kalipucang, gelombang pasang/abrasi 1 kali, tanah longsor 4 kali yaitu di Kecamatan Langkaplancar dan Kecamatan Kalipucang dan banjir sebanyak 5 kali yaitu di Kecamatan Pangandaran Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Kalipucang.

(Pangandaran Actual Disaster Information (PADI). 2021).

Selain itu Pemerintah Daerah dalam membangun dan menyediakan sarana prasarana pencegahan bencana masih belum optimal mulai dari pembangunan fisik yaitu pembangunan dan pemeliharaan saluran air sehingga pada waktu hujan besar tidak dapat menampung debit air sehingga menyebabkan banjir. Masih banyaknya daerah rawan bencana yang belum dilakukan upaya penanggulangannya seperti Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Cigugur dan Kecamatan pangandaran.

Dengan demikian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana kurang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan sehingga terdapat masyarakat di Kabupaten Pangandaran yang masih mengalami ancaman, resiko, dan dampak bencana. Distribusi kelompok relawan yang tidak merata, kapabilitas peralatan dalam mitigasi bencana masih terbatas. Pemerintah Daerah masih kurang melakukan pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana.

Kabupaten Pangandaran dalam RPJMD Tahun 2016-2021 memiliki Visi yaitu Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Bekelas Dunia. Guna mewujudkan Visi

Kabupaten Pangandaran tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana memiliki visi yaitu “Masyarakat dan Wisatawan Pangandaran Tangguh Menghadapi Bencana”

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pangandaran dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana. Dalam upaya mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai kearifan lokal.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Mitigasi Kebencanaan. Kegiatan sosialisasi didasari oleh betapa pentingnya mengantisipasi terjadinya bencana, dengan mengusung tema “Siap Tanggap Bencana, Bersama Saling Menjaga”. Selain itu juga melakukan kegiatan simulasi tanggap bencana yaitu bagaimana cara penyelamatan diri dari bencana gempa bumi, dan cara menyelamatkan korban bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaan

mitigasi di kawasan wisata sudah berjalan, untuk gladi atau simulasi telah dilakukan terhadap masyarakat umum.

Dalam memberikan data dan informasi kebencanaan telah memanfaatkan media sosial berupa Facebook, Twitter dan Instagram, Whatsapp, sekarang ditambah dengan website yang diberi nama Pangandaran Actual Disaster Information (PADI), yang berada dibawah kendali Pusdalops PB Kabupaten Pangandaran. Melalui Website ini diharapkan seluruh warga masyarakat beserta stakeholder terkait, lebih mudah, cepat, tepat dan akurat dalam mendapatkan informasi kebencanaan di Kabupaten Pangandaran pada khususnya dan informasi dunia pada umumnya. Namun penanggulangan pra bencana secara umum masih butuh penguatan.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan masalah-masalah menyangkut belum optimalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan sosialisasi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pangandaran. Hal ini ditunjukkan dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Kurang tanggapnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta instansi terkait dalam penanggulangan prabencana seperti membangun dan menyediakan sarana prasarana pencegahan bencana.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum optimal dalam

melakukan komunikasi secara langsung pada lembaga kemasyarakatan ataupun lembaga pendidikan untuk menyampaikan informasi mengenai mitigasi bencana terutama pada daerah yang rawan bencana, seperti mengunjungi sekolah-sekolah untuk diberikan informasi mitigasi bencana.

3. Dalam tahap pra bencana seperti kegiatan Pencegahan masih banyaknya fakta di lapangan yaitu kurang tanggapnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran beserta instansi terkait dalam penanggulangan Pra bencana. Contoh, bencana banjir di Kecamatan pangandaran akibat luapan sungai di Desa Babakan dan Pananjung dengan ketinggian sekitar 60 sentimeter dan paling tinggi mencapai 120 sentimeter dan bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Jayasari dan Jadikarya Kecamatan Langkaplancar, dan Desa Campaka Kecamatan Cigugur

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana sosialisasi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pangandaran?”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Sosialisasi

Sutaryo, (2014:230) menyatakan bahwa: Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan

sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya

Melalui proses sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri. Dengan begitu, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota masyarakat.

Selanjutnya sosialisasi menurut Abdulsyani, (2018:152) adalah: “Proses sosial antara kelompok-kelompok dan individu-individu yang saling berhubungan, yang merupakan bentuk antara akses sosial, ialah bentuk-bentuk yang nampak kalau kelompok-kelompok manusia atau orang perorangan mengadakan hubungan satu sama lain. Kemudian ditegaskan lagi bahwa proses sosial adalah rangkaian *human action* (sikap/tindakan manusia) yang merupakan aksi dan reaksi atau *challenge* dan respons di dalam hubungannya satu sama lain

Hal ini tampak bahwa sosialisasi merupakan proses belajar kepada seseorang agar dapat mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, agarnanti dapat

hidup di masyarakat dengan layak. Sosialisasi merupakan proses membimbing individu ke dalam dunia sosial.

Abdulsyani, (2018:154-155) bahwa dalam proses sosial dapat dikatakan terjadi interaksi sosial, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai aspek kehidupan bersama, yaitu:

1. Kontak Sosial, adalah hubungan antara satu orang atau lebih, melalui percakapan dengan saling mengerti dengan maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Kontak sosial tidak langsung adalah kontak sosial dengan menggunakan alat, sebagai perantara misalnya telepon, radio, surat dan lain-lain. Sedangkan kontak sosial langsung adalah kontak sosial melalui suatu pertemuan dengan bertatap muka dan berdialog diantara kedua belah pihak tersebut
2. Komunikasi Sosial, adalah syarat pokok lain dari proses sosial. Komunikasi sosial mengandung pengertian persamaan pandangan antara orang-orang yang berinteraksi terhadap sesuatu. Komunikasi bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perikelakuan orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerik badaniah atau sikap)

perasaan-perasaan yang ingin disampaikan. Dengan adanya komunikasi, maka sikap dan perasaan di satu pihak atau sekelompok dapat diketahui dan dipahami oleh pihak orang atau sekelompok orang lain

Berdasarkan uraian di atas bahwa proses sosial dapat dikatakan terjadi interaksi sosial, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai aspek kehidupan bersama meliputi aspek kontak sosial dan aspek komunikasi sosial.

Pengertian Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 bahwa: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Peristiwa atau rangkaian peristiwa bahwa peristiwa bisa bersifat tunggal (peristiwa/ fenomena alam) atau bisa lebih dari satu peristiwa (rangkaiannya peristiwa/fenomena alam) dalam waktu hampir bersamaan.

Menurut Nurjanah, dkk (2013:10) menyatakan bahwa: "Bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda

dan kerusakan lingkungan, kejadian itu diluar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya.

Sedangkan Haryanto (2012:35) mengemukakan bahwa: “Bencana adalah terjadinya kerusakan pada pola pola kehidupan normal, bersipat merugikan kehidupan manusia, struktur sosial serta munculnya kebutuhan masyarakat”.

Berdasarkan pengertian bencana diatas, bahwa pada dasarnya pengertian bencana secara umum yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan kerusakan berupa sarana prasana maupun struktur sosial yang sifatnya mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.

Pengertian Mitigasi Bencana

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 1 Ayat 6 bahwa: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana Mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana.

Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. (UU No 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat (1)

Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c

dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana (PP No 21 Tahun 2008 Pasal 20 ayat 1) baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat.

Kegiatan mitigasi bertujuan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dan pengurangan risiko bencana untuk jangka waktu yang panjang, mengurangi jumlah korban, dan diterapkan semaksimal mungkin untuk meminimalisir dampak (Noor, 2014:115). Masyarakat yang berada di dalam wilayah rawan bencana maupun di luar wilayah tersebut berperan penting dalam pelaksanaan, kesadaran dan kecintaanya terhadap norma-norma yang ditetapkan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mitigasi merupakan bagian dari pengurangan risiko bencana. Kegiatan mitigasi tersebut bersifat struktural maupun non-struktural.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mitigasi bencana merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya penyadaran seluruh masyarakat dan pemerintah terkait serta meningkatkan kemampuan untuk menghadapi bencana dan meminimalisir dampak dari bencana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hal ini karena masalah yang diteliti merupakan suatu situasi sosial yang sifatnya deskriptif.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan/ analisis data penelitian ini yaitu Reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dan verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontak Sosial

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi kontak sosial bahwa Petugas BPBD telah memberikan informasi mitigasi bencana secara langsung pada anggota keluarganya. Informasi terkait dengan mitigasi bencana telah disampaikan oleh petugas pada lingkungan keluarganya sehingga lebih cepat mengetahui dan memahami tindakan-tindakan yang harus dilakukan pada saat pra bencana.

Kemudian Petugas BPBD belum dapat menyampaikan informasi mitigasi bencana pada intansi di tingkat desa. BPBD dalam menyampaikan informasi tentang mitigasi bencana belum dilakukan secara menyeluruh di tingkat desa. Pemberian informasi tersebut baru dilakukan pada desa-desa yang letaknya cukup berdekatan dengan kantor BPBD dan desa yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.

Selanjutnya Petugas BPBD dalam memberikan informasi pada masyarakat luas masih belum optimal dilaksanakan. Pemberian informasi bagi masyarakat luas secara langsung masih jarang dilakukan, pemasangan

atribut berupa spanduk dan striker masih kurang memadai dan juga jarang ditampilkannya dalam media elektronik dan media cetak terkait dengan mitigasi bencana.

Melalui proses sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri. Dengan begitu, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota masyarakat.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Abdulsyani, (2018:152) bahwa:

Proses sosial antara kelompok-kelompok dan individu-individu yang saling berhubungan, yang merupakan bentuk antara akses sosial, ialah bentuk-bentuk yang nampak kalau kelompok-kelompok manusia atau orang perorangan mengadakan hubungan satu sama lain. Kemudian ditegaskan lagi bahwa proses sosial adalah rangkaian *human action* (sikap/tindakan manusia) yang merupakan aksi dan reaksi atau *challenge* dan respons di dalam hubungannya satu sama lain.

Berdasarkan teori di atas bahwa sosialisasi merupakan proses belajar kepada seseorang agar dapat mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, agar

nanti dapat hidup di masyarakat dengan layak. Sosialisasi merupakan proses membimbing individu ke dalam dunia sosial.

2. Komunikasi Sosial

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi komunikasi sosial bahwa petugas BPBD kurang melakukan kegiatan kunjungan langsung pada masyarakat untuk menyampaikan informasi mitigasi bencana. Pihak BPBD melakukan kunjungan pada masyarakat secara langsung ketika di suatu daerah tertimpa bencana dan bukan menyampaikan informasi terkait dengan mitigasi bencana. Selanjutnya Petugas BPBD kurang memberikan informasi pada organisasi kemasyarakatan, masih banyak organisasi kemasyarakatan yang belum menerima informasi mitigasi bencana secara langsung dari pihak BPBD. Kemudian petugas BPBD belum dapat mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan informasi mitigasi bencana secara keseluruhan, masih banyak sekolah yang belum menerima kunjungan dari BPBD apalagi terhadap sekolah yang lokasinya jauh dari kantor BPBD. Selain itu BPBD telah menggunakan media berbasis teknologi untuk memberikan informasinya pada masyarakat yaitu Facebook, Twitter dan Instagram, Whatsapp, sekarang ditambah dengan website yang diberi nama Pangandaran Actual Disaster Information.

Komunikasi sosial adalah kegiatan komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu situasi integrasi

sosial. Komunikasi sosial juga merupakan suatu proses pengaruh dan mempengaruhi mencapai keterkaitan sosial yang dicita-citakan antar individu yang ada di masyarakat.

Komunikasi sosial adalah sekaligus suatu proses sosialisasi, melalui komunikasi sosial kelangsungan hidup sosial dari suatu kelompok sosial akan terjamin. Melalui komunikasi sosial dicapai stabilitas sosial tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan oleh suatu masyarakat. Melalui komunikasi sosial kesadaran masyarakat dipupuk, dibina, diperluas. Melalui komunikasi sosial masalah-masalah sosial dipecahkan melalui konsensus.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan Ihromi (2016:12) bahwa:

Sosialisasi dibedakan atas dua tahap yakni: Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum dan keluarganya yang berperan sebagai agen sosialisasi. Sosialisasi sekunder, didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dunia objektif masyarakat; dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada

terwujudnya sikap profesionalisme; dan dalam hal ini menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, *peer group*, lembaga pekerjaan, lingkungan yang lebih luas dari keluarga.

Berdasarkan teori di atas bahwa proses sosialisasi itu pun amat besar pengaruhnya bagi kehidupan warga masyarakat itu sendiri secara individual. Kiranya tanpa mengalami proses sosialisasi yang memadai tidak mungkin seorang warga masyarakat akan dapat hidup normal tanpa menjumpai kesulitan dalam masyarakat. Jelas, bahwa hanya dengan menjalani proses sosialisasi yang cukup banyak sajalah seorang individu warga masyarakat akan dapat menyesuaikan segala tingkah pekertinya dengan segala keharusan norma-norma sosial. Hanya lewat proses sosialisasi ini sajalah generasi-generasi muda akan dapat belajar bagaimana seharusnya bertingkah pekerti di dalam kondisi-kondisi dan situasi tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sosialisasi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pangandaran pada umumnya dilaksanakan, namun belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya beberapa indikator yang pelaksanaannya belum optimal seperti belum optimalnya Petugas BPBD dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana pada intansi di tingkat desa, Petugas BPBD dalam

memberikan informasi pada masyarakat luas kurang optimal, petugas BPBD masih kurang melakukan kegiatan kunjungan langsung pada masyarakat untuk menyampaikan informasi mitigasi bencana, BPBD belum optimal dalam memberikan informasi pada organisasi kemasyarakatan dan kurangnya BPBD dalam mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan informasi mitigasi bencana.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam sosialisasi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pangandaran, antara lain sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya BPBD dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana pada intansi di tingkat desa yang disebabkan oleh alokasi anggaran yang belum memadai, lokasi desa yang cukup jauh dari kantor BPBD, belum adanya kesiapan dan kesediaan petugas untuk dapat mengunjungi setiap desa.
- b. Belum optimalnya BPBD dalam memberikan informasi pada masyarakat luas yang disebabkan oleh keterbatasan sumber anggaran, belum memadainya sarana dan fasilitas pendukung sosialisasi seperti kurangnya pemasangan spanduk dan striker terkait dengan mitigasi bencana dan kurangnya kesediaan petugas untuk

- menyampaikan secara langsung pada masyarakat
- c. Kurangnya BPBD dalam melakukan kegiatan kunjungan langsung pada masyarakat untuk menyampaikan informasi mitigasi bencana yang disebabkan oleh keterbatasan sumber pembiayaan, belum adanya agenda kegiatan yang ditetapkan dan juga kurangnya kesiapan dan kesediaan petugas untuk melaksanakan kunjungan secara langsung pada masyarakat.
 - d. Belum optimalnya BPBD dalam memberikan informasi pada organisasi kemasyarakatan yang disebabkan oleh belum adanya komunikasi dan kerjasama yang terjalin dengan organisasi kemasyarakatan, belum adanya agenda yang ditetapkan dan alokasi sumber anggaran yang belum memadai
 - e. Kurangnya optimalnya BPBD dalam mengunjungi sekolah-sekolah yang disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran yang disediakan oleh BPBD, belum ditetapkannya agenda kegiatan dan juga belum terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan pihak sekolah.
- Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan dalam sosialisasi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pangandaran, antara lain sebagai berikut:
- a. Mengoptimalkan informasi mitigasi bencana pada intansi di tingkat desa dengan cara mengajukan permohonan penambahan sejumlah anggaran pada pemerintah daerah untuk kegiatan operasional petugas di lapangan dan melengkapi sejumlah fasilitas pendukung. Selain itu terlihat adanya penyusunan ulang agenda kegiatan sehingga untuk dapat mengunjungi seluruh desa di wilayah Kabupaten Pangandaran dapat terwujud
 - b. Mengoptimalkan pemberian informasi pada masyarakat luas dengan cara pengajuan penambahan alokasi anggaran pada pemerintah daerah untuk biaya pengadaan berbagai atribut sosialisasi berupa pengadaan spanduk, stiker dan pamflet serta meminta petugas dilapangan untuk tetap memberikan informasi secara langsung pada masyarakat.
 - c. Melakukan kegiatan kunjungan langsung pada masyarakat untuk menyampaikan informasi mitigasi bencana dengan cara mengajukan permohonan penambahan alokasi sumber anggaran pada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan, melakukan penyusunan ulang agenda kegiatan dan meminta petugas untuk siap sedia melakukan kunjungan secara langsung pada masyarakat.
 - d. Mengoptimalkan pemberian informasi pada organisasi kemasyarakatan dengan cara melakukan pendekatan melalui jalinan komunikasi dan koordinasi untuk menciptakan kerjasama

antara kedua belah pihak, menyusun ulang agenda kegiatan sosialisasi sehingga pemberian informasi menjadi sebuah agenda kegiatan dan juga dilakukannya penambahan sejumlah alokasi anggaran.

Meningkatkan kunjungan ke sekolah-sekolah dengan cara mengajukan penambahan alokasi anggaran untuk biaya sosialisasi dan operasional kegiatan, menyusun ulang agenda kegiatan dan melakukan pendekatan melalui jalinan komunikasi dengan pihak sekolah-sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sosialisasi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pangandaran, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pangandaran secara umum dilaksanakan dengan kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar informan menyatakan telah dilaksanakan namun belum optimal. Berdasarkan hasil observasi bahwa pada umumnya sosialisasi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan kurang optimal seperti belum optimalnya Petugas BPBD menyampaikan informasi pada intansi di tingkat desa, memberikan informasi pada masyarakat luas, melakukan kegiatan kunjungan langsung pada masyarakat,

memberikan informasi pada organisasi kemasyarakatan dan kurangnya BPBD dalam mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan informasi mitigasi bencana.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam sosialisasi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pangandaran yaitu keterbatasan sumber anggaran, fasilitas pendukung yang belum memadai, lokasi desa yang memang cukup jauh dari kantor BPBD, belum adanya kesiapan dan kesediaan petugas untuk dapat mengunjungi setiap desa, belum adanya komunikasi dan kerjasama yang terjalin dengan organisasi kemasyarakatan.

Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan dalam sosialisasi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pangandaran dengan cara mengajukan permohonan penambahan sejumlah anggaran pada pemerintah daerah untuk kegiatan operasional petugas di lapangan dan melengkapi sejumlah fasilitas pendukung. Selain itu terlihat adanya penyusunan ulang agenda kegiatan dan melakukan pendekatan melalui jalinan komunikasi dan koordinasi untuk menciptakan kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. (2018). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

BPBD Kabupaten Pangandaran, 2020

- BPBD Kabupaten Pangandaran, 2021
- Haryanto, Heru Sri. (2012). *Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Penanggulangan Bencana Vol 2 No 1.
- <https://news.detik.com/berita-jawa-barat>. diakses 6 Januari 2021.
- Ihromi. (2016). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Yayasan Obor. Indonesia
- Noor. Djauhari. (2014). *Geologi untuk Perencanaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nurjanah, Sugiharto, Dede Kuswanda, Siswanto, dan Adikoesoemo. (2013). *Manajemen Bencana*, Bandung: Alfabeta
- Pangandaran Actual Disaster Information (PADI). 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Sutaryo. (2014). *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana